

Berita Yudha

MEMENANGKAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM ERA GLOBALISASI

RABU, 5 AGUSTUS 1998 - NO 1740 TH XXXI

TERBIT 8 HALAMAN HARGA Rp. 900

Prabowo Bisa Diajukan Ke Mahmil

Rapat DKP Berlangsung 8,5 Jam

Jakarta, BY

Tim Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai oleh Jenderal TNI Subagyo Hadisuswoywo memulai rapat pertamanya di Mabes TNI AD, Jl Veteran Jakarta, Selasa (4/8).

Rapat pertama ini berlangsung sekitar 8,5 jam, dipimpin langsung oleh Subagyo dan dihadiri oleh seluruh anggota tim yang terdiri dari Letjen TNI Fachrud Razi, Letjen TNI Yusuf Kartanegara, Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen TNI Agung Gunemalar, Laksdya TNI Achmad Soetipio, Letjen TNI Djamarri Chansago, Letjen TNI Arie Kumant dan Letjen TNI Sugiono.

Rapat yang berlangsung maraton sejak pukul 09.00 hingga pukul 17.30 WIB ini bersifat intern dan sangat tertutup untuk wartawan. Ruang tempat berlangsungnya rapat yang berlokasi di gedung utama Mabes TNI AD dijaga sangat ketat oleh aparat keamanan, sehingga wartawan sama sekali tidak bisa mendekati.

Bahkan, Dinas Penerangan TNI AD (Dispena) pun tidak diizinkan menjadi jura bicara tim tersebut, sehingga informasi yang diperoleh wartawan mengenai materi rapat sulit diperoleh.

"Saya tidak ditunjuk sebagai jura bicara DKP, sehingga tidak mengetahui isi dan materi rapat yang saat ini sedang berlangsung," kata Komandan Brigjen TNI H Dewa Putu Rai kepada puluhan wartawan yang menunggunya.

"Jagi, yang berhak meributkan pernyataan seperti materi pembicaraan dalam rapat DKP hanya Ketuaanya," tambah Putu.

"Apakah rapat ini akan berlangsung top hard?" tanya pers.

Putu tidak merincinya. Menutupinya yang berhak menentukan jadwal akan rapat hanya tim DKP.

Hingga rapat usai, sejumlah wartawan yang hanya bisa menunggu diluar gedung tidak berhasil mendapatkan informasi apakah dalam rapat tersebut juga ikut dihadirkan Letjen TNI Prabowo, Mayorjen TNI Muchdi dan Kolonel Inf Chairawan.

"Saya belum tahu, apakah dalam rapat ini sudah dihadirkan ketiga perwira itu, atau sistemnya seperti satu persatu atau justru rapat ini hanya bersifat pengumpulan data, hingga belum seorang pun diperiksa pada hari ini," jelas Putu Rai.

Meski berkali-kali dinyatakan Kadipend, Tim DKP mungkin tidak berencana menombol keberanian pers pada hari ini, namun sejumlah wartawan rela menunggu hingga rapat usai.

Dan, perkiraan tersebut ternyata benar. Sejumlah wartawan yang menunggu, terpaksa hanya menanti "jil padio", ketika sebuah rapat sekitar pukul 17.30, ternyata Jenderal Subagyo berlalu begitu saja tanpa bersedia memberikan keterangan resmi.

Kari Prabowo Dipastikan Berakhir

Sementara itu sumber BY di Mabes ADR1 menyuarakan, seorang perwira yang di-DKP-kan dipisahkan karir militernya akan berakhir. Dan hasilnya masa karir militer perwira yang di-DKP-kan menurut sumber yang tidak ingin disebut jati dirinya itu bisa dipertanyakan DKP melalui tiga cara.

Pertama, masa pensiunnya akan dipercepat, atau ia diberhentikan secara terhormat dan yang terakhir bisa keterlibatannya



TINJAU GLODOK - Bari kiri Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan, Gubernur DKI Sutiyoso, Menkop Adi Sasono, Menku Bambang Subianto, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Djaja Supatman, Selasa (4/8) kemarin, saat meninjau Pusat Perokan Glodok pasca kerusuhan pertengahan Mei

sangat berat, ia akan diberhentikan secara tidak hormat," ujar sumber yang berpegang jenderal bintang dua ini.

Ditanya mekanisme kerja yang dilakukan oleh DKP perwira tinggi ini menyebutkan sistem yang digunakan dalam DKP mirip dengan sebuah pengadilan, mirip skemanya lebih kecil akan dimintai langsung oleh Ketua DKP.

Dalam pemeriksaan yang mirip sidang ini, seorang perwira yang diajukan ke DKP berhak didampingi oleh perwira pendamping.

"Perwira pendamping ini bekerja mirip seperti seorang pembela dalam sebuah pengadilan," ujarnya.

Dalam sidang DKP, seorang perwira yang dituduh melanggar kode etik perwira akan diperiksa

dan ditanya sejauh mana keterlibatannya. Selanjutnya ia juga akan ditanya siapa atasan yang telah memberi perintah sehingga tugas tersebut dilakukannya.

"Apabila dalam sidang DKP nanti, perwira itu mengatakan ia menanggapi perintah langsung dari Pangab waktu itu, maka sudah jelas Pangab tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi apa-

bila dalam sidang itu ia mengatakan, perintah diterima langsung dari Pangdi, maka dipisahkan Pangab yang bertugas waktu itu akan bebas dari tanggungjawab," katanya.

Mengenai dijakannya ketiga perwira itu ke pengadilan di Mahkamah Militer, sumber BY mengatakan hal itu sangat mungkin terjadi.

"Karena seorang perwira yang

dianggap melanggar satu pun dalam kode etik perwira, dipaksa sudah melanggar hukum lagi dalam kasus ini. Jadi hehehe mungkin, ia akan diadili," katanya.

"Jadi, sangat tidak berkalau ada pilot yang menwatirkan kasus ini kecil-kecilan dibawa ke mahmil," bantunya. (nan)